

**PERAN KOMITE DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI  
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) NEGERI 2  
BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



**Jurusan :Manajemen Pendidikan Islam**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H /2019 M**

**PERAN KOMITE DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI  
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) NEGERI 2  
BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



**M. MIRHASAN  
NPM.1411030287**

**Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam**

Pembimbing I : **Dr. Rubhan Masykur, M.Pd**  
Pembimbing II : **Dr. Hj. Romlah, M.Pd. I**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H /2019 M**

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs N 2 Bandar Lampung. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung? 2). Bagaimana peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung?, 3). Apa Faktor pendukung dan penghambat peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung?. Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) mengetahui mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung, 2) mengetahui peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan a MTs N 2 Bandar Lampung, 3) mengetahui faktor pendukung dan penghambat peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung.

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam perjalanan mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa data-data yang tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati sehingga dalam hal ini penulis berupaya mengadakan penelitian yang bersifat menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Selain itu keabsahan datanya di cek menggunakan teknik triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan member check.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung dikatakan cukup baik, itu dapat dilihat dari segi input, proses, dan outputnya. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung, meliputi: 1) sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency): Komite MTs N 2 Bandar Lampung sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah. 2) sebagai pendukung (supporting agency) peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi upaya peningkatan mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya, komite ikut membantu dan menunjang sarana dan prasarana sekolah. 3) sebagai pengotrol (controlling agency) komite MTs N 2 Bandar Lampung melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah. 4) sebagai mediator (executive) komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian sekolah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah.

Implikasi atau saran dari penelitian ini adalah : 1) Agar komite sekolah bisa lebih berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan, orang tua siswa, maupun lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, agar tercipta sikap toleransi dan saling

mendukung dalam tujuan yang sama yaitu meningkatkan mutu pendidikan. 2)  
Peran komite sekolah harus lebih dioptimalkan lagi.



## **MOTTO**

**“Berbahagialah jika hidupmu didunia bermanfaat bagi manusia lainnya”**

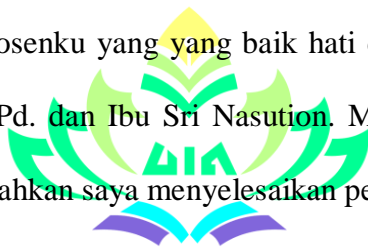


## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT dan saya bersyukur yang tak henti-henti selalu terucapkan kepada Allah SWT atas anugerah dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bak M. Mazran dan Mak Rohaya yang saya sayangi dan yang saya kagumi. Dan senantiasa menyayangiku, mengajarku, mendo'akanku tanpa ada rasa lelah, letih dan bosan. Dan selalu mendukung saya untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan pendidikan S.1 ini.
2. Untuk 8 suadaraku, baik wo Rozyani, ngah Hayyani, kakak Lisda, kakak Risna dan adik-adikku, adik Arna, Adik Rizma, Adik Melya, Adik bungsu Desta Aulia. trimakasih sudah menjadi semangatku dalam menyelesaikan pendidikan ini dan selalu menanyakan kapan wisuda.
3. Untuk teman-teman disekeliling saya yang tak bisa saya sebutkan trimakasih sudah memberikan suportnya yang tidak henti.
4. Trimakasih kepada seseorang pernah ada dalam perasaan yang selalu menanyakan kapan skripsi mulai digarap.
5. Kepada kedua pembimbing saya Bapak Dr. H. Rubhan Masykur. M.Pd. pembimbing 1 dan Umi Dr. Hj. Romlah. M.Pd, Pembimbing 2, trimakasih atas bimbingannya, trimakasih atas ilmu yang diberikan, dan kemudahan-kemudahan semasa saya bimbingan skripsi.
6. Trimakasih Kepada ibu Prof. Dr. Nirva Diana. M.Pd. selaku dekan Fakultas tarbiyah.

7. dan juga mantan Dekan Fakultas Tarbiyah Pabatin Prof. Dr. H. Chairul Anwar. M.Pd. juga Bapak Drs. Amirudin. M.Pd.I selaku manta Kajur MPI.
8. Kepada Bapak Dr. Subandi. MM. Selaku Wadek 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
9. Kepada ibu Dr. Eni. M.Pd. selaku Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) .
10. Kepada ibu dosenku yang yang baik hati dan cantik – cantik, Miss Septa Aryanika, M.Pd. dan Ibu Sri Nasution. M.Pd. juga dosen-dosen yang sudah memudahkan saya menyelesaikan pendidikan S.1 ini.



## **RIWAYAT HIDUP**

M. Mirhasan dilahirkan di Pekon Sukamarga, kecamatan bangkumat, Kabupaten Lampung barat (sekarang Kabupaten Pesisir Barat) Pada tanggal 14 oktober 1995. Anak ke-5 dari 9 (sembilan) bersaudara, Pasangan Bapak M. Mazran dan Ibu Rohaya. Pendidikan saya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 01 Sukamarga, Pekon Sukamarga kecamatan bangkumat Kabupaten Lampung barat (Sekarang Pesisir Barat) selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Darul \_ Falah Dusun Sumberagung, Pekon Sukamarga, Kecamatan Bangkumat Lampung Barat (sekarang pesisir Barat) Lulus Pada Tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Krui (MAN KRUI) Pekon Kampung Jawa, kecamatan Pesisir tengah Krui, Kabupaten Lampung Barat (Sekarang Pesisir Barat) mengambil Jurusan IPS dan lulus pada tahun 2013.

Kemudian pada tahun 2014 meneruskan pendidikan S.1 ke Perguruan Tinggi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan hingga sekarang. Pada Bulan Juli sampai Agustus 2017 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Wates kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Kemudian pada Bulan November sampai Desember penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL di SMAN 9 Bandar Lampung.



Penulis juga Pernah Aktif dalam organisasi dan Pernah mengikuti Kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Pengurus Pramuka MAN 1 Krui tahun 2011-2012
2. Pengurus ROHIS MAN 1 Krui tahun 2011-2012
3. Pengurus SANGGAR SENI MAN 1 Krui 2011-2012
4. Aktif diHimpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah dan keguruan Cabang Bandar Lampung sebagai anggota tetap pada tahun 2014 sampai sekarang dan diamanahkan menjadi pengurus di Wakil Sekretaris Bidang PTKP Pada tahun 2018-2019.
5. Menjadi Ketua Umum Forum komunikasi Pemuda dan Masyarakat Bangkunt (FKPMB) Pada tahun 2016-2019
6. Aktif dikomunitas Sadar Kesehatan Lampung sebagai Devisi Kgiatan social dari tahun 2016 sampai sekarang.
7. Aktif dihimpunan Mahasiswa dan Pemuda Pesisir Barat (HMPPB) pada 2015 dan diamanahkan mejadi Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS) 2017-2018
8. Aktif diPemuda Muhammadiyah Lampung dan diamanahkan menjadi Anggota Bidang HIKMAH pada tahun 2019-2020.

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Nirva Diana, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Eti Hadiati, M.Pd. selaku ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam
3. Bapak Dr. Rubhan Masykur, M.Pd selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Romlah, M.Pd.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
5. Karyawan dan karyawan yang telah membantu dalam pengadministrasian sehingga proses berjalan lancar.
6. Kepala sekolah, Komite, Guru dan Staf TU serta siswa-siswi MTs N 2 Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.

7. Teman-teman Jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2014 yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT. Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kebaikan penulis dalam belajar.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. amin ya rabbal alamin.



Bandar lampung,

2019

**M. Mirhasan**

NPM.1411030287

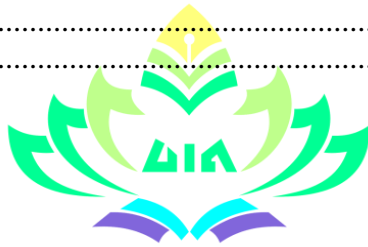
## DAFTAR ISI

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>       | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>             | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>               | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>         | <b>vi</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>       | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>      | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>          | <b>x</b>    |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                           | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                          | 1         |
| B. Fokus Penelitian.....                                | 9         |
| C. Rumusan Masalah.....                                 | 9         |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                  | 10        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                     | <b>11</b> |
| A. Peran Komite dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan..... | 11        |
| 1. Komite Sekolah.....                                  | 14        |
| 2. Mutu Pendidikan.....                                 | 39        |
| B. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Komite.....    | 47        |
| 1. Faktor Pendukung .....                               | 47        |
| 2. FaktorPenghambat.....                                | 48        |
| C. Penelitian Relevan.....                              | 48        |
| D. Kerangka Berfikir.....                               | 53        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                  | <b>55</b> |
| A. Metode dan Prosedur Penelitian.....                  | 55        |
| B. Tempat Penelitian.....                               | 57        |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Data dan Sumber Data .....                 | 57        |
| D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data ..... | 58        |
| E. Prosedur Analisis Data .....               | 61        |
| F. Pemeriksa Keabsahan Data .....             | 64        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>       | <b>66</b> |
| A. Hasil Penelitian .....                     | 66        |
| B. Pembahasan.....                            | 77        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>       | <b>85</b> |
| A. Kesimpulan .....                           | 85        |
| B. Saran.....                                 | 88        |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan, dimana dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya mutu pendidikan. Hal ini bisa dirasakan, yaitu ketika sebuah lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikannya itu dengan cara yang benar-benar bagus, maka akan dapat dilihat mutunya. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya maka hasilnya pun biasa-biasa saja.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, tugas guru dalam proses pendidikan, yaitu menanamkan sikap dan nilai pada diri peserta didik. Oleh karena itu, guru disamping sebagai pengajar atau penyampaian materi pelajaran guru juga berperan “...sebagai pelatih (*coach*), pembimbing (*counselor*) dan manager belajar (*learningmanager*)”<sup>1</sup>, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan

---

<sup>1</sup> Chairul Anwar, *Hakikat Manusia Dalam Dunia Pendidikan, Sebuah Tinjauan Filosofi*, (Yogyakarta: Suka – Press, 2014), h. 93

mutumanajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan

Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa ataupun negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, "...supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Perubahan tingkah laku atau sikap menjadi perhatian..."<sup>2</sup> pendidikan menjadi faktor utama atau penentu bagi masa depan bangsa. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3 bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, Tilaar mengemukakan bahwa, sebagaimana dikutip oleh Mulyasa, pendidikan nasional dewasa ini dihadapkan pada empat krisis pokok, yakni yang berkaitan dengan mutu, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa sedikitnya ada enam masalah pokok yang terkait dengan sistem pendidikan nasional: 1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik, 2) pemerataan

---

<sup>2</sup>Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer, (Yogyakarta : IRCISOD, 2017), h. 111

kesempatan belajar, 3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, 4) status kelembagaan, 5) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan 6) sumber daya yang tergolong minim dan belum profesional.<sup>3</sup>

Keenam masalah tersebut merupakan imbas daripada sistem pendidikan Indonesia yang carut-marut dan tidak menentu. Menurunnya akhlak dan moral peserta didik pada dasarnya disebabkan oleh kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, dalam sebuah proses pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, konsep pendidikan dalam ajaran Islam dijelaskan dalam Al-qur'an

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"

Berdasarkan ayat di atas, dapat dilihat bahwa konsep pendidikan menurut Al-Qur'an diarahkan pada upaya menolong anak didik agar dapat melaksanakan fungsinya mengabdikan kepada Allah. Seluruh potensi yang dimiliki anak didik yaitu potensi intelektual, jiwa dan jasmani harus di bina secara terpadu dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang tergambar dalam sosok manusia seutuhnya. Dan mengajarkan peserta didik untuk selalu menghormati kedua orang tua, menjalankan perbuatan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta mengajarkan

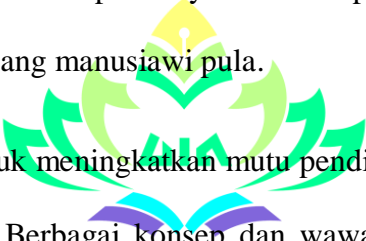
---

<sup>2</sup>Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h.4



peserta didik untuk menjalankan hubungan manusia dengan melakukan perbuatan baik, sikap dan perilaku dalam pergaulan, serta kesederhanaan dalam berkomunikasi dengan sesama.

Para pendidik secara inklusif harus mengembangkan nilai-nilai ilahiyah (ketuhanan) dan insaniyah (kemanusiaan) dalam berperilaku interaksi dengan individu (peserta didik), keluarga, dan masyarakat. Karena sesungguhnya setiap individu mempunyai hak sepenuhnya untuk dapat hidup bebas (merdeka) dan mendapat perlakuan yang manusiawi pula.



Sebuah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia tidak pernah berhenti dan selesai. Berbagai konsep dan wawasan baru akan terus berproses seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Konsep dan wawasan baru itu diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global. Dengan demikian persoalan peningkatan mutu pendidikan sangat perlu dikaji dan diperjuangkan.

Mereliasisasikan perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan maka perlu adanya pembenahan dari segi sumber daya manusianya, lembaga penyelenggara pendidikannya seperti SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan perguruan tinggi dan semuanya itu perlu didukung oleh sumber daya pendidik yang layak. Sumber daya pendidikan itu antara lain: tenaga ahli atau guru, manajemen, kurikulum, sarana dan prasarana, serta dana yang diadakan dan

didayagunakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerjasama.<sup>4</sup>

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat dan pemerintah.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peran serta dan dukungan masyarakat, baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah komite sekolah.

Keberadaan komite sekolah ini telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004,

---

<sup>4</sup>Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Widyamata, 2006), h. 3

<sup>5</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006) h. 11

dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam Undang-Undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tanggal 2 April tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.<sup>6</sup>

Dalam Lampiran II: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah, dinyatakan bahwa keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
4. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.<sup>7</sup>

Berdasarkan keputusan Mendiknas tersebut, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka

---

<sup>6</sup>Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007),h..92

<sup>7</sup>Kepmendiknas SK No. 044/U/2002, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),h. 122

meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penanaman badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, Komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.<sup>8</sup>

Adapun tujuan komite sekolah yaitu 1). Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; 2). Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan 3). Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu disatuan pendidikan.<sup>9</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah memang dipandang strategis sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama pendidikan agama islam di Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat serta pakar dan pengamat pendidikan yang diundang untuk memberikan masukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pada umumnya sangat antusias dan mendukung sepenuhnya gagasan pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah.

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat, sekolah harus bisa membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat,

---

<sup>8</sup>Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h.89-90

<sup>9</sup>Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, h. 90

menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama.<sup>10</sup> Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di setiap satuan pendidikan.



Mts Negeri 2 Bandar Lampung merupakan salahsatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang menyikapi dengan serius permasalahan pendidikan yang telah lama menjangkrit terutama yang menyangkut masalah peningkatan mutu pendidikan. Lembaga ini dalam menyikapi permasalahan tersebut tidaklah bekerja sendiri, namunMts Negeri 2 Bandar Lampungmengikutsertakan pihakkomite sekolah sebagai partner kerjanya. Langkah ini diambil karena pihak lembaga menyadari bahwa berfikir, berbuat dan bekerja akan lebih baik jika dilakukan dengan bersama (stakeholders).<sup>11</sup>

Selain itu juga pihak sekolah berasumsi bahwa pendidikan merupakan masalah semua pihak terutama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pihak Mts Negeri 2 Bandar Lampungberusaha seoptimal mungkin

---

<sup>10</sup>Hamzah.B. Uno, *Profesi Kependidikan* .h. 93

<sup>11</sup>Arifin, *Wawancara dengan Kepala Mts Negeri 2 Bandar Lampung*.12 Januari 2018

memberdayakan dan mengikutsertakan keterlibatan komite sekolah dalam segala jenis usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.<sup>12</sup>

Hal ini dimaksudkan, agar semua elemen masyarakat dapat ikut serta dalam menyukseskan pendidikan putra-putrinya dengan mutu yang lebih baik. Karena itu juga, hal ini sebagai bagian dari respon terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam beberapa Undang-Undang dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang terkait dengan pengikutsertaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik membahas masalah dengan judul “*Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Mts Negeri 2 Bandar Lampung*”.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar pokok permasalahan yang diteliti tidak melebar dari apa yang ditentukan semula, maka penelitian ini hanya memfokuskan pada masalah tertentu. Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Mts Negeri 2 Bandar Lampung.
2. Faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Mts Negeri 2 Bandar Lampung.

---

<sup>12</sup>Andriyani, Wawancara dengan Kepala Mts Negeri 2 Bandar Lampung. 12 Januari 2018

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang perlu dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Mts Negeri 2 Bandar Lampung?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Mts Negeri 2 Bandar Lampung?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Berpijak dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Mts Negeri 2 Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Mts Negeri 2 Bandar Lampung.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dijelaskan beberapa manfaat dari pelaksanaan penelitian masalah tersebut, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

- b. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi para pembaca, pengajar dan para pihak yang berkecimpung dalam lembaga pendidikan pada umumnya serta bagi penulis khususnya agar menyadari betapa pentingnya peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Secara institusional, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan melalui peranan komite sekolah.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia merupakan pra-syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan, dan pendidikan merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Sementara salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan (sekolah), khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan salah satunya adalah diterapkannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yaitu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.<sup>13</sup>

Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan peran sertanya secara aktif dalam pengelolaan pendidikan, mutu pendidikan bisa meningkat jika manajemen pendidikan dikelola secara benar, manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha dua orang atau lebih dan atau usaha bersama

---

<sup>13</sup>Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* .h. 3

untuk mendayagunakan semua sumber secara efektif, efisien dan rasional untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan<sup>14</sup> dan lembaga yang mewadahnya adalah dewan pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kota dan komite sekolah yang berkedudukan di satuan pendidikan (sekolah). Munculnya kedua lembaga ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.

Komite sekolah merupakan sebuah konsep pemahaman baru bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan harus dikelola secara terbuka dan demokratis. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu dinilai sangat tepat. Adapun peranan yang dijalankan oleh komite sekolah, yaitu:

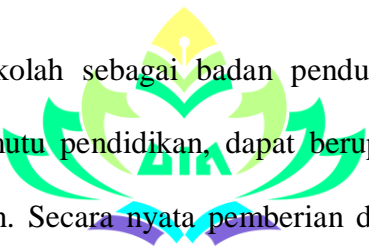
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat di satuan pendidikan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dra. Romlah, M.Pd. I, "MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM BUKU DARAS" Jurnal UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2016, h 1.

<sup>15</sup>Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, hal. 92-93

Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan bagi sekolah memiliki arti, bahwa komite sekolah dipandang sebagai mitra kerja kepala sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah. Melalui komite sekolah orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah.

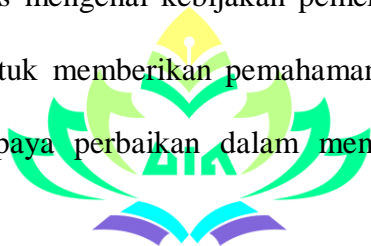


Peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi penyelenggara dan upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak. Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidikan.

Komite sekolah juga berperan sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang tua dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah

ditetapkan disekolah sehingga dapat akuntabel (dipertanggung jawabkan) kepada masyarakat. Bagi komite sekolah peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Sesuai dengan peranannya sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat, komite sekolah berusaha untuk memberikan pengarah dan keterangan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwa pemerintah selalu melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya.



## **1. Komite Sekolah**

### **a. Pengertian Komite Sekolah**

Perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi telah membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan peluang berpartisipasi tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mengacu kepada Dalam "... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 ayat 1 yang menyatakan peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam

penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan...)<sup>16</sup> dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 ayat 1 menyatakan masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, juga diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Pasal 192 ayat 2.<sup>17</sup> Para perencana pembangunan termasuk di dalamnya pejabat pemerintah, mengartikan partisipasi sebagai dukungan terhadap program atau proyek pembangunan yang direncanakan dan di tentukan oleh pemerintah. Besarnya partisipasi masyarakat sering diukur oleh seberapa besar sumbangan yang diberikan masyarakat yang ikut menanggung biaya pembangunan, apakah itu berupa uang atau tenaga. Makna partisipasi yang berlaku secara universal adalah kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan suatu program pembangunan.<sup>18</sup>

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri secara langsung.

---

<sup>16</sup>Imam Gunawan, *Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktek* (Bandung : Alfabeta Bandung, 2017) .h. 421

<sup>17</sup>Imam Gunawan, *Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktek* (Bandung : Alfabeta Bandung, 2017) .h. 422, 423, 424.

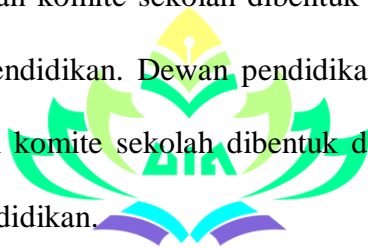
<sup>18</sup>Depertamen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003. H. 9

Osorio, menjelaskan bahwa “*SBM is the decentralization of authority from the central government to the school level*” MBS merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah yang merupakan pemegang peranan utama dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan secara berkelanjutan. Di Nigeria terdapat istilah SBMC (*school based management committe*), Akinola menjelaskan bahwa SBMC adalah sebuah pendekatan untuk reformasi pendidikan yang memungkinkan sekolah secara mandiri untuk membuat keputusan berkaitan dengan keuangan, kurikulum, pengawasan, kebutuhan staf dan isu-isu lain yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”. MBS memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengambil berbagai kebijakan operasional sekolah yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan *stakeholder*, antara lain guru, siswa, komite sekolah, dan tokoh masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan harus melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Partisipasi masyarakat di dalam pendidikan sudah ditetapkan didalam undang-undang, walaupun demikian dalam pelaksanaannya masih belum dapat tercapai. Hubungan masyarakat dengan sekolah masih dalam paradigma lama yaitu masih bersifat satu arah dan bersifat birokratis dan hierarkis. Masyarakat dan sekolah masih saling defensif. Sekolah masih

memandang masyarakat sebagai orang lain atau pihak yang berada di luar sekolah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada Pasal 56 ayat 1 menjelaskan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan berupa perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. Dewan pendidikan dan komite sekolah dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dewan pendidikan dibentuk di setiap kabupaten atau kota, sedangkan komite sekolah dibentuk di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan.



Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, menjelaskan bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan akan semakin meningkat. Dewan pendidikan dan komite sekolah diharapkan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Melalui lembaga tersebut peran masyarakat akan semakin sentral dalam pendidikan.

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dijelaskan bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah yang dibentuk di setiap sekolah, merupakan lembaga strategis dan sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Komite sekolah.

menurut Kim. A sebagai berikut.

*The school council is a collective decision-making body through broad participation of teachers, parents, and community leaders in the important decision-making process about school management.*

Komite sekolah atau dewan sekolah adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi dari para guru, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan sekolah. Komite sekolah yang ada di luar negeri contohnya di Boston yaitu salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Komite sekolah yang dikenal dengan nama *The Boston School Commite*.



*The School Committee is responsible for: defining the vision, mission and goals of the Boston Public Schools; establishing and monitoring the annual operating budget; hiring, managing and evaluating the Superintendent; and setting and reviewing district policies and practices to support student achievement.*

Komite sekolah adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menentukan visi, misi dan tujuan dari sekolah, menetapkan dan memantau anggaran operasional tahunan, menggunakan, mengelola dan mengevaluasi, dan menentukan serta mengkaji kebijakan dan praktik untuk mendukung prestasi siswa.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang dibentuk untuk mewadahi peran serta masyarakat di setiap satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Komite sekolah diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat



dalam penyelenggaraan sekolah, sehingga timbul rasa saling memiliki dan saling bertanggung jawab dalam kemajuan sekolah.

Komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Komite sekolah merupakan lembaga yang sangat penting bagi keberlangsungan sekolah. menjelaskan bahwa *“School councils may facilitate head teachers in different academic, administrative and financial issues of the school”*. Komite sekolah mempunyai tanggung jawab dalam beberapa aspek yaitu administratif, akademik, dan finansial sekolah. *Frontier School Division in Manitoba Canada* menjelaskan bahwa komite sekolah terlibat dalam tiga aspek perencanaan sekolah yaitu mengidentifikasi topik, masalah dan prioritas untuk dimasukkan dalam rencana sekolah multi-tahun, rencana anggaran, rencana laporan sekolah dan laporan masyarakat.

Peran komite sekolah dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 adalah pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, dan penghubung (*mediator agency*) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite sekolah sebagai badan pertimbangan berperan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sekolah.

Zajda menjelaskan bahwa komite sekolah sangat dominan dalam pengambilan keputusan perencanaan sekolah khususnya dalam pengambilan keputusan tentang anggaran sekolah (*approval of the school budget*) dan pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah (*approval of the school improvement plan*). Komite sekolah sebagai badan pertimbangan mempunyai tiga fungsi yaitu memberikan pertimbangan dalam perencanaan sekolah, pelaksanaan program pendidikan, dan pengelolaan sumber daya pendidikan.

Komite sekolah sebagai badan pendukung berperan dalam memberikan dukungan terhadap sekolah dapat berwujud finansial, pemikiran, atau tenaga dalam penyelenggaraan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Department of Education, Newfoundland menjelaskan bahwa.

*school councils shall participate in support and promote the plan approved by the board for improving teaching and learning in the school and approve and monitor activities for the raising of funds for the school.*

Komite sekolah berperan dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan memantau kegiatan penggalangan dana untuk sekolah.

Ontario Ministry of Education menjelaskan bahwa komite sekolah memainkan peran penting dalam sistem pendidikan di Ontario. Komite sekolah memberikan dukungan dalam peningkatan prestasi belajar siswa dan kinerja sekolah. Komite sekolah sebagai badan pendukung mempunyai tiga fungsi yaitu memberikan dukungan dalam pengelolaan sumber daya sekolah, pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, dan pengelolaan anggaran sekolah .

Department of Education, Newfoundland menjelaskan bahwa komite sekolah sebagai badan pengontrol melakukan perannya dalam dalam menyetujui dan memantau kegiatan penggalangan dana untuk sekolah, membantu dalam sistem monitoring dan evaluasi standar di sekolah, dan memantau pelaksanaan rekomendasi dalam laporan kinerja sekolah.

*approve and monitor activities for the raising of funds for the school, assist in the system of monitoring and evaluating standards in the school, and monitor the implementation of recommendations in reports on the performance of the school.*

Osorio, menjelaskan bahwa komite sekolah sebagai badan pengontrol berperan dalam memantau kinerja sekolah, seperti nilai ujian, kehadiran guru dan siswa, dan memeriksa laporan keuangan bulanan. Komite sekolah melakukan pengontrolan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan. Komite sekolah sebagai badan pengontrol mempunyai tiga fungsi

yaitu mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, memantau pelaksanaan program sekolah, dan memantau *output* pendidikan.

Khan menjelaskan bahwa komite sekolah di Pakistan sebagai badan penghubung berperan dalam membantu pertemuan antara wali siswa dengan guru dan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan dengan semua anggota komite sekolah, sebagai berikut.

*Responsibilities of school Councils in Pakistan are to help them in parent teacher meeting, and to hold one meeting of school council every month so that there should be at least 10 meeting in year.*



Ontario Ministry of Education menjelaskan peran komite sekolah sebagai berikut.

*School councils play a vital role in the education system in Ontario. They provide a forum through which parents and other members of school communities can contribute to improving student achievement and school performance.*

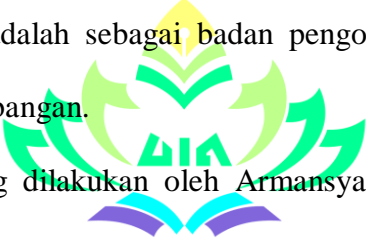
Komite sekolah mempunyai peran penting dalam sistem pendidikan. Komite sekolah menyediakan sebuah forum di mana orang tua dan anggota lain dari komunitas sekolah dapat berkontribusi terhadap peningkatan prestasi belajar siswa dan kinerja sekolah. Zajda menjelaskan lebih jauh lagi tentang peran komite sekolah sebagai badan penghubung yaitu “*Engaging parents, carers and the community in education, including community and business partnerships*”. Komite sekolah sebagai badan penghubung meningkatkan keterlibatan orang tua,

wali dan masyarakat dalam pendidikan, termasuk masyarakat dan perusahaan mitra sekolah atau DU/DI.

Haryadi, Meirawan, & Rahadi menjelaskan bahwa komite sekolah berperan sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, meliputi kegiatan sebagai melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, dan menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Komite sekolah sebagai badan penghubung mempunyai tiga fungsi yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah dalam perencanaan pendidikan, pelaksanaan program sekolah, dan pengelolaan sumber daya pendidikan.

Permasalahan yang muncul adalah komite sekolah belum dapat menjalankan perannya dengan baik, kehadiran komite sekolah dipandang sebagai badan legalitas (stempel) yang mengesahkan berbagai pungutan dana oleh pihak sekolah. Di samping itu, pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan kurang mengetahui tentang fungsi dan peran komite sekolah. Komite sekolah dianggap sama saja dengan badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3). Hal ini menunjukkan sosialisasi komite sekolah belum terlaksana dengan baik kepada masyarakat bahkan kepada komite sekolah itu sendiri. Komite sekolah yang telah dibentuk itu pun banyak yang belum memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) yang disusun berdasarkan aspirasi orangtua dan masyarakat sebagai komponen utama *stakeholder* pendidikan.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Nurlaela, mengenai peran komite sekolah dalam membangun kemitraan antara DU/DI dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), menemukan bahwa peran komite sekolah masih kurang, baik sebagai lembaga pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan sebagai lembaga mediator. juga menjelaskan bahwa peran komite sekolah yang paling menonjol adalah sebagai badan pendukung dan yang paling lemah adalah sebagai badan pengontrol. sedangkan Nurdin Hidayat menjelaskan bahwa peran komite sekolah yang paling lemah adalah sebagai badan pengontrol dan paling tinggi adalah sebagai badan pertimbangan.



Penelitian yang dilakukan oleh Armansyah menjelaskan bahwa komite sekolah dalam melaksanakan perannya hanya sebagai pemberi pertimbangan dan pengawasan yang lebih utama, sedangkan perannya sebagai pendukung dan mediator belum sepenuhnya terlaksana. Hasil pra survei pada SMK di Kabupaten Lamongan juga menunjukkan bahwa komite sekolah masih kurang aktif. Komite sekolah hanya berperan dalam hal pendanaan sekolah. Komite sekolah belum terlibat dalam pembelajaran dan program-program sekolah.

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama semua elemen bangsa, mulai dari pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia usaha dan industri (DUDI), dan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan untuk itu masyarakat dan orang tua memiliki peranan penting dalam kemajuan pendidikan. Tanpa dukungan masyarakat pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal.

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, yang diatur dalam pasal 54 ayat 1, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Kemudian dalam pasal 2 dinyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Sedangkan hak dan kewajiban masyarakat diatur dalam pasal 8 dan 9, masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain dalam UU Sisdiknas di atas, dalam Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendidikan pada pasal 3 disebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti: a) pendirian dan penyelenggaraan pendidikan; b) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan; c) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli; c) pengadaan dan/ atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum dilaksanakan pemerintah menunjang pendidikan nasional; d) pengadaan dana dan pemberian bantuan lainnya; e) pengadaan dan pemberian bantuan sarana belajar; e) pemberian kesempatan untuk magang; f) pemberian pemikiran dan pertimbangan; g) pemberian bantuan manajemen dan; h) pemberian bantuan dalam bentuk kerjasama.

Berdasarkan UU Sisdiknas dan PP 39 tahun 1992 tersebut di atas dapat terlihat besarnya peran yang harus diambil/ dilakukan oleh masyarakat dalam pendidikan. Hal ini tentunya memiliki tujuan tertentu.

Suryosubroto menjelaskan tujuan penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah:

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sekolah
- 2) Meningkatkan pemahaman sekolah tentang keadaan dan aspirasi masyarakat terhadap sekolah .
- 3) Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranan pendidikan dalam era pembangunan
- 4) Menjalinkan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan anak didik dalam setiap kegiatan pendidikan di sekolah.

Lebih lanjut Nasution mengungkapkan tujuan yang hendak dicapai dari adanya hubungan antara masyarakat dengan sekolah sebagai berikut: 1) mengembangkan pemahaman kepada masyarakat tentang maksud dan sasaran dari sekolah, 2) memberikan penilaian program kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah, 3) menjalin dan meningkatkan hubungan harmonis antara orang tua siswa dengan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik, 4) membangun kesan positif dan memelihara kepercayaan tentang sekolah, 5) menginformasikan kepada masyarakat tentang rencana program dan kegiatan sekolah, 6) mencari bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah,



7) sekolah sebagai jasa lembaga pendidikan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan (siswa, keluarga dan masyarakat lain), 8) supaya kreativitas mencari dana pendidikan alternatif dalam bentuk kerjasama dengan lembaga lain.

Selanjutnya Aedi dan Rosalin menjelaskan tujuan konkrit hubungan antara sekolah dan masyarakat antara lain:

- 1) Guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik
- 2) Berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini
- 3) Berguna dalam mengembangkan program-program sekolah kearah yang lebih maju dan lebih membumi agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna jasa pendidikan.

Melihat kondisi dan keprihatinan terhadap kualitas pendidikan dengan tidak optimalnya peran komite sekolah, maka perlu berbagai strategi untuk melakukan pemberdayaan komite sekolah. Mulai tahun 2011 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan bantuan sosial kepada komite sekolah. Pemberian bantuan sosial tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan komite sekolah sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Pada tahun anggaran 2013 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan Bantuan Sosial pemberdayaan komite sekolah yang dikelola Bagian Keuangan Sekretariat

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dengan nilai bantuan sosial Rp 15.000.000,- setiap komite sekolah. Sejalan dengan pemberian bantuan sosial tersebut, maka perlu dilakukan penilaian terhadap peran komite sekolah. Komite sekolah yang mempunyai program kerja dan peran yang baik yang layak mendapatkan bantuan sosial, jangan sampai ada komite sekolah yang hanya nama, tetapi tidak ada hasil kerjanya, pembentukannya hanya sebagai syarat untuk memperoleh dana bantuan semata.

Berangkat dari uraian di atas, maka penelitian ini berfokus pada peran komite sekolah dalam penyelenggaraan SMK di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Penelitian tentang peran komite sekolah perlu dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan peran komite sekolah di masing-masing SMK (SMK negeri dan SMK swasta) sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, dan badan penghubung, sehingga dapat menjadi informasi yang sangat berguna untuk merencanakan program pemberdayaan dalam peningkatan mutu pendidikan melalui komite sekolah.

Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka diperlukan suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran, gagasan, dalam mengupayakan kemajuan pendidikan yang diberi nama Komite Sekolah. Dalam hal ini, Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan sekolah, baik pendidikan prasekolah maupun pendidikan dasar dan menengah. Komite sekolah merupakan suatu badan atau

lembaga non-profit dan non-politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis para stakeholder pendidikan sekolah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.<sup>19</sup>

Menurut Sanafiah Faizal (1981) hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari dua segi yaitu : (1) sekolah sebagai partnert dari masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan, dan (2) sekolah sebagai produser yang menangani peranan-peranan pendidikan dari masyarakat lingkungannya.<sup>20</sup> Untuk itu sekolah dan masyarakat harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan disamping tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Hamzah B. Uno, mengemukakan bahwa masyarakat adalah stakeholder yang berkepentingan dengan keberhasilan sekolah. Masyarakatlah yang membayar pendidikan melalui pembayaran pajak, oleh karena itulah sekolah harusnya bertanggung jawab terhadap masyarakat. Masyarakat yang disebutkan di atas memiliki konsep yang kompleks dan tidak terbatas sehingga sekolah sangat sulit untuk berinteraksi secara intensif. Perlu adanya pembatasan konsep masyarakat untuk memudahkan hubungan sekolah dengan masyarakat. Penyederhanaan konsep masyarakat tersebut dilakukan dengan adanya “perwakilan” yang

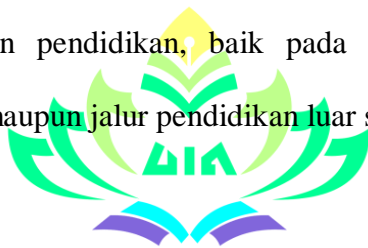
---

<sup>19</sup> Depertamen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003. H..9-11

<sup>20</sup>Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan* (Surabaya:Usaha Nasional, 1981), h. 148.

kemudian direalisasikan dengan membentuk Komite Sekolah dengan mempertimbangkan representasi keragaman masyarakat yang ada.<sup>21</sup>

Menurut Zamroni, Komite Sekolah merupakan organ semi formal yang dimiliki sekolah sebagai salah satu wujud partisipasi orang tua dan masyarakat. Pengertian Komite Sekolah lainnya dijelaskan dalam Kemdiknas (2002) sebagai berikut. Komite Sekolah adalah badan yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.<sup>22</sup>



#### **b. Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah**

Komite sekolah berkedudukan disetiap satuan pendidikan, yaitu sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, dari jenjang pendidikan, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah baik sekolah negeri maupun swasta. Pada setiap sekolah terdapat satu komite sekolah. Dalam hal terdapat beberapa sekolah pada satu lokasi, atau beberapa sekolah yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi berdekatan, atau beberapa sekolah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk kordinator komite sekolah.

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite

---

<sup>21</sup>Hamzah B. Uno.(2010). *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara h. 85-86

<sup>22</sup>Zamroni.(2007). *Meningkatkan Mutu Sekolah, Teori, Strategi dan Prosedur*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah. H. 63

sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).<sup>23</sup>

### **c. Tujuan Komite Sekolah**

Berdasarkan buku pedoman Komite Sekolah tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

1. Mewadahi dan menyalurkan inspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.<sup>24</sup>



### **d. Peran dan Fungsi Komite Sekolah**

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung

---

<sup>23</sup>Depertamen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003. h.11-12

<sup>24</sup>Depertamen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003. h. 14-16

jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan.<sup>25</sup>

Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 54. Dan secara spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
3. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.<sup>26</sup>

Adapun peran yang dijalankan komite sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

---

<sup>25</sup>Hasbullah .*Otonomi Pendidikan*. H. 91

<sup>26</sup> Republik Indonesia UU RI No 20 Tahun 2003,.h. 29

- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (*executive*), dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sementara itu, untuk menjalankan peran komite sekolah juga berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
2. Melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
  - a. Kebijakan dan program pendidikan;
  - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
  - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
  - d. Kriteria tenaga pendidikan;
  - e. Kriteria fasilitas pendidikan;
  - f. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.<sup>27</sup>

Komite Sekolah sesuai peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut :

- a. Komite sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholder* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.<sup>28</sup>

#### **e. Organisasi Komite Sekolah**

##### **1. Keanggotaan**

Keanggotaan komite sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota.

---

<sup>27</sup>Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*. h. 93-94

<sup>28</sup>Depertamen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003. h.16



Anggota komite sekolah tersebut dibentuk dengan ketentuan-ketentuan unsur tertentu, misalnya:

- a. Unsur masyarakat yang berasal dari : orang tua/wali peserta didik; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; dunia usaha/industri; organisasi profesi tenaga pendidikan; wakil alumni; dan khusus untuk jenjang pendidikan menengah, wakil peserta didik.
- b. Unsur dewan guru, paling banyak 15% dari jumlah anggota Komite Sekolah.
- c. Unsur yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan;
- d. Badan Pertimbangan Desa atau lain-lain yang dianggap perlu dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah;
- e. Perwakilan dari organisasi siswa, bagi Madrasah Aliyah.

Jumlah anggota Komite Madrasah disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlahnya gasal.



## 2. Kepengurusan

Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite dianjurkan bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. yang menangani urusan administrasi Komite Sekolah sebaiknya juga bukan pegawai sekolah.

Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite Sekolah.
- b. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.
- c. Jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

Mekanisme kerja pengurus Komite Sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pengurus Komite Sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
- b. Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.
- c. Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan dengan kepengurusan baru.
- d. Pembiayaan pengurus Komite Sekolah diambil dari anggota Komite Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah

### 3. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga

Komite Sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga (AD/ART). Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan
- b. Dasar, tujuan dan kegiatan;
- c. Keanggotaan dan kepengurusan;
- d. Hak dan Kewajiban anggota dan pengurus;
- e. Keuangan;
- f. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
- g. Perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi.

Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat:

- a. Mekanisme pemilihan, penetapan anggota, dan pengurus Komite Sekolah
- b. Rincian tugas Komite Sekolah.Mekanisme rapat.
- c. Kerjasama dengan pihak lain.
- d. Ketentuan penutup.

#### 4. Pembentukan Komite Sekolah

##### a. Prinsip Pembentukan

Pembentukan Komite Sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, berkeadilan, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa Komite Sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dilakukan secara berkeadilan adalah dengan perwakilan masyarakat. Sekolah atau lainnya secara proporsional dan adil. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

##### b. Mekanisme

Pembentukan Komite Sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan atau oleh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.

Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3, Majelis Sekolah dan Komite Sekolah yang sudah ada) tentang Komite Sekolah menurut keputusan ini.
2. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
3. Menyeleksi anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
4. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat.
5. Menyusun nama-nama terpilih.
6. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah.
7. Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada kepala satuan pendidikan.
8. Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.

c. Penetapan

Calon anggota Komite Sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara banyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota Komite Sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur. Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Misalnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebutkan bahwa pemilihan anggota dan pengurus Komite Sekolah ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.

Pengurus dan anggota Komite terpilih dilaporkan kepada pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat. Untuk memperoleh kekuatan hukum, komite sekolah dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintahan setempat. Misalnya, Komite

Sekolah untuk SD dan SMP dikukuhkan oleh Camat dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat.<sup>29</sup>

## 2. Mutu Pendidikan

### a. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.<sup>30</sup>

Secara etimologis, mutu adalah derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun intangible. Menurut Jurusan mutu adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya.

Atau kini dapat mengacu kepada undang-undang sisdiknas no 19 tahun 2005. Sudarwan mendefinisikan “Mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu atau kerja, baik berupa barang maupun jasa”.<sup>31</sup>

Crosby berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, reliability, maintainability, dan cost effectiveness. Sementara itu, Deming menyatakan bahwa mutu harus bertujuan memenuhi kebutuhan siswa sekarang dan dimasa yang akan datang. Menurut Elliot (1993) kualitas/mutu adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan

---

<sup>29</sup>Departemen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003. h. 16-22

<sup>30</sup>Rohiat, *manajemen sekolah teori dasar dan praktik*. Bandung : Refika Aditama. h.52

<sup>31</sup>Amirudin, “Reformulasi Manajemen Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pesantren Salaf di Kabupaten Pringsewu Lampung”, *Jurnal Al-Idarah* Vol. 5 No. 1, 2015, h. 4.

tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai dengan tujuan. Mutu merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan *stakeholder*. Bersistem pencegahan, mempunyai standar tanpa cacat dan mempunyai ukuran harga ketidakpuasan. Mutu/Kualitas diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan *stakeholder* dan upaya perubahan ke arah perbaikan terus menerus sehingga dikenal dengan istilah  $Q = MATCH$  (*Quality = meets agreed and Changes*)<sup>32</sup>

Menurut Goetch dan Gavis menjelaskan kualitas/mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.<sup>33</sup>

Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.<sup>34</sup>

Input pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan dan siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan dan lain sebagainya). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program dan lain sebagainya. Input harapan-harapan berupa visi, misi,

---

<sup>32</sup>Muhammad Muhassin Kepemimpinan Visioner Kepala Madrasah dan Mutu Pendidikan di Madrasah” jurnal AL-Adarah Vol.VII No. 2, 2017,h 33.

<sup>33</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009),h. 554

<sup>34</sup>Umeidi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*.h. 25

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.<sup>35</sup>

Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah) proses yang dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, proses belajar mengajar, serta proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.

Proses dikatakan bermutu apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pepaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb) dilakukan secara harmonis dan terpadu sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).

---

<sup>35</sup>Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik* (Bandung: PT. Refika Aditama 2010).h.52

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: 1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan harian, nilai ulangan umum atau nilai pencapaian ketuntasan kompetensi, hasil Ebtanas, karya ilmiah, lomba akademik, karya-karya lain peserta didik dan 2) prestasi non-akademik seperti IMTAQ, kejujuran, kesopanan dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) misalnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.<sup>36</sup>

Sudarwan Danim mengatakan bahwa hasil (output) pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang di capai oleh peserta didik. Sedangkan keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang di peroleh siswa selama mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.<sup>37</sup> Disamping itu, mutu keluaran (output) juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh dari anak didik selama menjalani pendidikan.

---

<sup>36</sup>Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik* . h.53

<sup>37</sup>Sudarwan Darim, *Visi Baru Manajemen Sekolah* (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2006)h. 53-



Menurut Ace Suryadi, mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.<sup>38</sup> Disamping itu, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik yang mampu menjadi pelopor pembaharuan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik itu di masa sekarang atau masa yang akan datang. Mutu pendidikan bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri akan tetapi terkait erat dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Sallismengungkapka*“qualityisatthetopofmostagendasandimproving qualityis probably the mostimportanttask facing anyinstitution.However, despite its importance, many people findquality anenigmatic concept.Itis perplexing to define andoftendifficultto measure”*.Kualitas adalah bagian penting dari seluruh agend dalam organisasi dan meningkatkan kualitas mungkin adalah tugas yang paling penting yang dihadapi institusi manapun. Namun, meskipun penting, banyak terjadi perbedaan pendapat tentang konsep dari kualitas yang baik.


Upayadalam peningkatan mutu pendidikan merupakan isu yang terus menerus akan menjadi perbincangan dalam pengelolaan/ manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan usaha yang harus diupayakan dengan terus menerus agar harapan untuk pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat tercapai.

---

<sup>38</sup> Ace Suryadi, *Indikator Mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia* (Jakarta: Balitbang Dek dik bud, 2002),h. 159

Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan seluruh *stakeholder* pendidikan. Semua orang tentunya akan lebih suka menuntut ilmu pada lembaga yang memiliki mutu yang baik. Atas dasar ini maka sekolah/ lembaga pendidikan harus dapat memberikan pelayanan dan mutu yang baik agar tidak ditinggalkan dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.

Untuk mengukur pendidikan yang berkualitas tentunya diperlukan kriteria/indikator. Sallis mengungkapkan ada banyak indikator mutu yang baik di lembaga pendidikan. Antaralain:

- 
- 1) *high moral values;*
  - 2) *excellent examination results;*
  - 3) *the support of parents, business and the local community;*
  - 4) *plentiful resources;*
  - 5) *the application of the latest technology;*
  - 6) *strong and purposeful leadership;*
  - 7) *the care and concern for pupils and students;*
  - 8) *a well-balanced and challenging curriculum.*

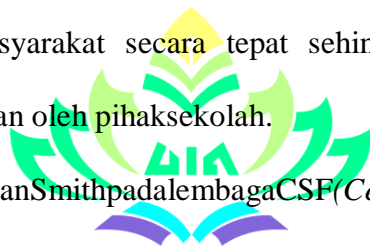
Pandangan ini menjelaskan bahwa sekolah yang bermutu dan baik harus memiliki: 1) nilai-nilai moral/karakter yang tinggi; 2) hasil ujian yang sangat baik; 3) dukungan orangtua, dunia usaha dan masyarakat setempat; 4) sumber daya berlimpah; 5) implementasi teknologi terbaru; 6) kepemimpinan yang kuat dan memiliki tujuan (visi); 7) kepedulian dan perhatian bagi siswa; 8)

kurikulum yang seimbang dan relevan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu dilihat dari banyak sisi

Telah banyak pakar pendidikan mengemukakan pendapatnya tentang faktor penyebab dan solusi mengatasi kemerosotan mutu pendidikan di Indonesia. Hadis dan Nurhayati menjelaskan dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumber daya manusia pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan profesional.

Hadis dan Nurhayati menjelaskan dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumber daya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan profesional.

Mutu adalah hal yang esensial sebagai bagian dalam proses pendidikan. Proses pembelajaran adalah tujuan organisasi pendidikan. Mutu pendidikan adalah mutu lulusan dan pelayanan yang memuaskan pihak terkait pendidikan. Mutu lulusan berkaitan dengan lulusan dengan nilai yang baik (kognitif, afektif, dan psikomotorik) diterima melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang berkualitas dan memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan mutu pelayanan berkaitan dengan aktivitas melayani keperluan peserta didik, guru dan pegawai serta masyarakat secara tepat sehingga semua merasa puas atas layanan yang diberikan oleh pihak sekolah.



Taylor, West dan Smith pada lembaga CSF (*Central for the School of the Future*)

*Utah State University* mengungkapkan indikator sekolah bermutu adalah:

- 1) dukungan orang tua.
- 2) kualitas pendidik.
- 3) komitmen peserta didik.
- 4) kepemimpinan sekolah.
- 5) kualitas pembelajaran.
- 6) manajemen sumber daya di sekolah.
- 7) kenyamanan sekolah.

Berangkat dari pengertian tersebut, maka dalam mendefinisikan mutu pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang dapat menghasilkan dan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta mampu menanamkan dan menumbuhkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan pandangan

hidupnya, yang diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam keterampilan hidupnya sehari-hari.<sup>39</sup>

#### **b. Ciri-ciri Mutu Pendidikan**

Era globalisasi merupakan era persaingan mutu. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mulai dari tingkat tinggi harus memperhatikan mutu pendidikan terutama mutu pendidikan. Lembaga pendidikan berperan dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia harus memiliki keunggulan-keunggulan yang diprioritaskan dalam lembaga pendidikan tersebut.

Transformasi menuju sekolah bermutu diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, administrator, staff, siswa, guru dan komunitas. Proses diawali dengan mengembangkan visi dan misi untuk wilayah dan setiap sekolah serta departemen dalam wilayah tersebut.<sup>40</sup>

### **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Faktor pendukung dan penghambat komite sekolah dalam menjalankan perannya :

---

<sup>39</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),h. 8

<sup>40</sup>Jerome S. Acaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip dan Tata Langkah Penerapan*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 10

## 1. Faktor pendukung

Bahwa untuk mengetahui hambatan atau masalah-masalah diatas perlu adanya dorongan atau dukungan baik dari pemerintah, pihak sekolah dan komite sekolah, yakni:

- a. Transparan berarti pembentukan komite sekolah dilakukan secara terbuka. Diketahui oleh masyarakat lingkungan sekolah mulai dari tahap persiapan, pembentukan panitia kriteria calon, pengumuman calon, proses pemilihan sampai dengan penyampaian hasil penilaian kepada masyarakat.
- b. Akuntabel dalam arti pembentukan komite sekolah yang dilakukan oleh pelaksana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara substansi maupun secara fungsional.
- c. Demokratis berarti pembentukan komite sekolah dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan sekolah, baik secara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara.<sup>41</sup>

## 2. Faktor Penghambat

Lembaga komite sekolah telah ada dan dibentuk disetiap sekolah di Indonesia. Tetapi keberadaan komite sekolah terutama di daerah tertinggal masih banyak menghadapi beberapa hambatan. Penyebabnya antara lain: (1) karena pelaksanaan dan fungsi komite sekolah tidak selalu dapat memenuhi harapan tersebut, (2) pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah masih sangat variatif. Di satu pihak ada komite sekolah yang masih melanjutkan peran dan fungsi BP3 yang sering

---

<sup>41</sup>Sri Renani Pantjastuti, *Komite Sekolah*. Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008 h. 84

disebut sebagai stempel kepala sekolah dan adapula komite sekolah yang justru ditakuti oleh kepala sekolah.<sup>42</sup>

Selain itu konsep yang amat elegan ini dalam praktek masih menyisakan penyakit sistem birokrasi yang sentralistik dan feodalistik. Sistem birokrasi “abs” asal bapak senang, birokrasi yang dilayani bukan melayani sistem birokrasi diatas meja bukan dilapangan, atau sistem birokrasi yang berorientasi untuk atasan bukan untuk pelanggan sebagaimana dipaparkan didepan ternyata tidak secara serta-merta dapat berubah meskipun telah diterapkan desentralisasi pendidikan dan dengan adanya otonomi pendidikan.<sup>43</sup>

Beberapa masalah pokok lain yang dihadapi tentang komite ini yang akhirnya dikatakan peranannya belum optimal, permasalahan termasuk antara lain:

- a. Masalah pemahaman, pemahaman tentang komite sekolah sangat beragam tentang peranannya, pembentukannya, keterwakilannya dalam susunan anggota dan yang lebih fatal lagi komite sekolah belum mempunyai AD dan ART komite.
- b. Masalah budaya yang dimaksudkan disini adalah berfikir serta bertindak masyarakat terhadap sekolah. Pola pikir mereka kebanyakan menganggap sekolah sebagai lembaga jasa dan masyarakat sebagai konsumen.
- c. Masalah pembinaan komite sekolah yang merupakan lembaga representatif masyarakat untuk sekolah sudah lama ada semenjak

---

<sup>42</sup>Sri Renani Pantjastuti, *Komite Sekolah*. h. 84

<sup>43</sup>Sri Renani Pantjastuti, *Komite Sekolah*. h. 71

adanya BP3, POMG, yang terakhir komite sekolah belum dapat berfungsi dengan baik.

- d. Masalah sosial ekonomi. Belum optimalnya peran komite sekolah disebabkan juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah.<sup>44</sup>

### C. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti hal serupa, seperti Widi Astuti dalam penelitiannya yang berjudul Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler di SD Negeri se Kecamatan Godean. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Subyek penelitian ini adalah Komite Sekolah yang terdiri dari wakil pihak sekolah, wakil dari pihak orang tua siswa, dan perwakilan dari masyarakat di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Godean yang berjumlah 60 orang dimana pengambilan sampel menggunakan proposional sample. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan angket/kuesioner dan studi dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa partisipasi Komite Sekolah dalam perencanaan kegiatan ekstra kurikuler sudah baik. Hal dalam bentuk sebagai berikut: dana 57.7%, ide, anjuran, saran 70.6%, tenaga 48.3%, dan dalam bentuk alat

---

<sup>44</sup>Ari Amin Hamidah, "Optimalisasi dan Peran Komite Sekolah", *Blog Ari Amin Hamidah*.<http://sertifikasiguru.blog.dada.net/post/1207056294/optimalisasi+peran+komitesekolah.html> (18 September 2015).



pendukung 47.8%.<sup>45</sup> Khoiril Mawahib, dalam penelitiannya yang berjudul Peran Komite Madrasah dalam Pengembangan MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta Hasil penelitiannya menunjukkan: (1) Komite madrasah MAN Maguwoharjo Sleman telah dibentuk sejak tahun pelajaran 2001-2002. Kepengurusan komite madrasah dinilai cukup representatif karena sudah memasukkan unsur pemerhati dan praktisi pendidikan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kalangan dunia usaha, alumni, pihak madrasah dan masyarakat secara umum. (2) Program yang dilaksanakan komite Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo belum optimal. Komite tidak punya inisiatif. Selama ini madrasah yang menawarkan program kepada komite Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo. (3) Komite madrasah di MAN Maguwoharjo Sleman telah berperan dalam pengembangan madrasah. Hal ini terbukti antara lain: (a) Memfasilitasi peserta didik dalam bidang ekstra kurikuler (b) Bekerjasama dengan madrasah membuka jurusan baru, yaitu jurusan agama (c) Mengusulkan workshop untuk guru, (d) Memberi pertimbangan terhadap kebijakan pendidikan MAN Maguwoharjo Sleman (e) Mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengembangkan madrasah. (4) Komite madrasah di Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo sudah lima tahun tidak mengalami reorganisasi.<sup>46</sup>

Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SDN 124 Paroto Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency): Komite SDN 124 Paroto sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan

---

<sup>45</sup> Widi Astuti, *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler di SD Negeri se Kecamatan Godean*, 2007, h.101

<sup>46</sup> Khoiril Mawahib, dalam penelitiannya yang berjudul *Peran Komite Madrasah dalam Pengembangan MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta*

pertimbanagannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah, misalnya pengadaan ruang sholat (mushalla), pengadaan perlengkapan sholat (mukenah, sarung, tikar sholat dan sajadah), selain itu juga komite sekolah memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS termasuk dalam penyelenggaraan rapat-rapat RAPBS.<sup>47</sup>

Serangkaian penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa berubahnya paradigma pendidikan yang berbasis sekolah dan menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh stakeholder mengharuskan masyarakat untuk ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam pendidikan Dengan adanya wadah partisipasi masyarakat melalui lembaga otonomi yakni Komite Sekolah mengharuskan untuk dapat berfungsi semaksimal mungkin sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Peran Komite Sekolah dalam melaksanakan MBS adalah wujud kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Selain kegiatan-kegiatan non akademik yang dilakukan Komite Sekolah, ada juga kegiatan akademik. Perkembangan peran dan fungsi yang terjadi pada komite sekolah itu tidak hanya dirasakan oleh pihak sekolah melainkan juga dirasakan oleh orang tua siswa/masyarakat. Keberadaan Komite Sekolah memberikan kebaikan bagi semua, oleh karena itu kerjasama tidak hanya dijalin dalam lingkup intern sekolah saja. Komite MTs N 2 Bandar Lampung juga bersinggungan dengan masyarakat.

---

<sup>47</sup>Sirajuddin, *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SDN 124 Paroto*

#### **D. Kerangka Berfikir**

Berdasarkan latar belakang masalah dan mengacu pada kajian teori yang telah penulis kemukakan dapat disusun suatu kerangka pikir guna menghasilkan hipotesis. Dalam suatu penelitian, variabel merupakan atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan, yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulanya. Menurut hubungan antar variabel satu dengan variabel lain maka variabel penelitian dapat dibedakan menjadi variabel bebas atau dikenal dengan variabel independen yakni variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat, dan variabel terikat atau dikenal dengan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen). Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ( $x$ ) adalah peran komite. Variabel terikat ( $y$ ) adalah meningkatkan mutu pendidikan.



**Kerangka Berpikir**

Keterangan :

X : Peran komite sekolah

Y : Mutu Pendidikan

Berdasarkan hal tersebut akan dibuktikan apakah peran komite sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan peran komite sekolah tersebut yang baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di MTs N 2 Bandar Lampung.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode dan Prosedur Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah merupakan penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (*holistic*) tanpa mengisolasi individu dan organisasinya dalam *variable* tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.<sup>48</sup> Penelitian kualitatif sering pula disebut metode etnografik, metode fenomenologis, atau metode impresionistik.<sup>49</sup>

Creswell mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>50</sup>

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan menjabarkannya, suatu data yang mengandung makna. Makna

---

<sup>48</sup> Loexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

<sup>49</sup> Nana Sujana, dkk., *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 195.

<sup>50</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 4-5

adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri.<sup>51</sup> Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan menjabarkannya, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri.<sup>52</sup>

Secara umum, penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip *deskriptif analitik/analisis deskriptif*. Analisis deskriptif dipahami sebagai suatu bentuk analisis yang ditujukan kepada pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang. Dikatakan analitik karena pada penelitian ini intinya adalah menganalisa peranan komite dalam meningkat mutu pendidikan faktor-faktor yang mendorong dan faktor-faktor yang menghambat peranan komite dalam meningkat mutu pendidikan tersebut. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.<sup>53</sup>

Penelitian ini adalah menganalisa peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan Mts Negeri 2 Bandar Lampung. Oleh karena itu metode yang dianggap cocok adalah pendekatan kualitatif. Melalui metode kualitatif ini diharapkan

---

<sup>51</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2015) h. 38

<sup>52</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2015) h. 38

<sup>53</sup> Winarno Surachmad, *Metode penelitian*, (Bandung : Tarsito, 1990), h. 40.

mampu memperoleh gambaran tentang strategi rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik di sekolah tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu pendidikan dan manajemen pendidikan, antara lain manajemen sumber daya manusia yang mengacu pada pendidikan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan sebagainya) berdasarkan fakta yang tampil apa adanya (paradigma natural).<sup>54</sup>



## **B. Tempat Penelitian**

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah di Mts Negeri 2 Bandar Lampung.

## **C. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan. Maka berdasarkan hal tersebut, sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. *Sumber Data Primer*, adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa interview dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, jumlah sumber data atau responden tidak ditentukan sebelumnya, sebab apabila telah diperoleh informasi yang maksimal, maka tujuan menelaah sudah terpenuhi. Oleh karena itu konsep sampel dalam penelitian kualitatif adalah berkaitan dengan bagaimana

---

<sup>54</sup> Noeng Muhajir, *metodologi Pendidikan Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesa, 2000), h. 147.

memilih responden dan situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terpercaya mengenai fokus peneliti.

2. *Sumber Data Skunder*, adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip penting. Adapun data skunder dalam penelitian ini adalah : (1) Buku-buku yang relevan dengan judul penelitian. (2) Dokumen-dokumen resmi secara tertulis tentang kondisi objektif di Mts Negeri 2 Bandar Lampung yang memiliki relevansi dengan fokus masalah penelitian. Sumber data tertulis tersebut nantinya akan dieksplorasi dengan teknik dokumentasi dan kajian kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, majalah ilmiah, arsip dan dokumen pribadi.

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>55</sup> Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik.<sup>56</sup> Jadi yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah “tuntasnya” perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sumber data.<sup>57</sup>

#### **D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling

---

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 216.

<sup>56</sup>*Ibid.*, h, 219

<sup>57</sup>*Ibid.*, h, .221



menunjang dan melengkapi tentang peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan di Mts Negeri 2 Bandar Lampung.

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang telah ditetapkan. Metode wawancara identik dengan interview, secara sederhana dapat dimaknai sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>58</sup>



### 2. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah jenis observasi partisipan, karenanya dalam studi ini peneliti bertindak tidak hanya sebagai pengamat, tetapi sekaligus sebagai instrument penelitian dengan tujuan berusaha menstimulus yang diteliti agar mengetahui realitas masalah yang sebenarnya sehingga data dapat diperoleh secara obyektif dan akurat.<sup>59</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung arti barang-barang tertulis,<sup>60</sup> maka metode dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal

---

<sup>58</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 135.

<sup>59</sup> Reason dalam Norman K, *Hand book of Quality Research*, (London : New Delhi, 1994), h. 325-337.

<sup>60</sup> Sutrisno Hadi, *Statistik II*, (Yogyakarta : UGM Press, 1986), h. 131.

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>61</sup>

Data yang telah terkumpul kemudian diolah yang dilakukan beberapa cara sebagai berikut<sup>62</sup> :

1. Pemeriksaan data (*editing*), adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Mengedit merupakan pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data. Editing bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan.
2. Penandaan data (*coding*) adalah memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, undang-undang, dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah. *Coding* maksudnya adalah data yang diedit diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat analisis. Rekontruksi data (*reconstructing*) adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

---

<sup>61</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202.

<sup>62</sup>Wagianto, *Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase syariah Dalam Penyelesaian sengketa perbankan di pengadilan agama kelas IA Tanjung Karang (Analisis dan perspektif UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum)*, (Bandar Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h.93-96

3. Sistematis data (*systematizing*) adalah menempatkan data menurut rangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Sistematika data dapat diartikan sebagai kegiatan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

#### **E. Prosedur Analisis Data**

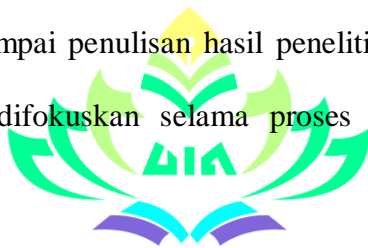
Menurut Bogdan, yang dikutip oleh Sugiono menyatakan bahwa “ Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others” (analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kepada unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang

lain. Untuk mengelola dan menganalisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dari Bogdan, meliputi :

#### 1. Proses Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution yang dikutip Sugiono menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.



##### a. Analisis sebelum dilapangan

Dalam melakukan analisis data sebelum penelitian memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.

##### b. Analisis selama dilapangan dengan model Miles dan Huberman

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

### 1) Reduksi data (data reduction)

Mereduksi data berarti merangkum data yang diperoleh lapangan selama penelitian dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberi kode pada aspek –aspek tertentu.

### 2) Penyajian Data (data display)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pada yang telah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3) Verification (conclusion drawing)

Verifikasi (penarikan kesimpulan) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan diawal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel.

## F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data kualitatif dapat dilakukan melalui strategi tertentu, yaitu (1) *Triangulation* yaitu teknik menggunakan multi investigasi, multi sumber atau data, atau multi metode untuk mengkonfirmasi temuan yang muncul; (2) *member check* yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data; (3) *long term observation*, melakukan perpanjangan pegamatan dimana peneliti berada di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai; (4) *peer examination*, Teknik dilakukan melalui berdiskusi dengan teman sejawat tentang hasil sementara atau hasil akhir yang dilakukan peneliti; (5) *participatory of collaborative modes of research*, tehnik ini menekankan pada partisipasi dalam keseluruhan pase penelitian mulai dari konseptual studinya, menulisnya hingga menghasilkan temuan; (6) *researcher's biases*, menekankan kemampuan peneliti mengklarifikasi asumsi-asumsinya dan orientasinya terhadap sebuah teori; (7) analisis kasus negative, yaitu teknik dengan melihat kasus negative, yaitu teknik dengan melihat kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga ada saat tertentu; (8) *thick description*, teknik ini digunakan untuk menguji keteralihan (validasi ekstrenal) dimana seorang meneliti dituntut melaporkan hasil penelitian dengan menguraikannya seteliti mungkin; (9) *auditing*, melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Teknik ini digunakan untuk menguji *dependability* (reliabilitas).<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Lexy J. Moleong, *Op. cit.*, h. 1

Dalam kaitannya dengan studi ini, peneliti menggunakan data teknik dalam pengumpulan data untuk menjamin keabsahan data, yaitu:

### 1. *Triangulation*

Triangulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>64</sup> Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah melalui sumber lainnya.<sup>65</sup> Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda melalui metode kualitatif.<sup>66</sup>

Hal ini dapat dicapai melalui; (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara. (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintah dan (5) membandingkan wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### 2. *Member Check*

*Member Check* yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Teknik dilakukan peneliti dengan menunjukkan dan

---

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 176

<sup>65</sup>*Ibid*, h. 178

<sup>66</sup>*Ibid*, h. 179

mengkonfirmasi kembali data-data yang telah diperoleh sebelumnya kepada informan yang sama.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang secara efisien dan efektif dalam proses belajar-mengajar artinya dimana hasil dari peserta didik telah mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah dari hasil wawancara sekaligus observasi yang peneliti lakukan, mutu pendidikan di MTsN 2 Bandar Lampung dapat dikatakan cukup baik, hal ini disampaikan oleh ketua komite MTs N 2 bandar lampung.<sup>67</sup>

umumnya, setiap lembaga pendidikan merupakan suatu institusi yang memposisikan diri-dengan meminjam istilah dalam dunia manajemen sebagai industri jasa, yaitu institusi yang memberikan pelayanan (service) sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Pelayanan atau jasa yang diberikan sudah barang tentu harus berupa sesuatu yang bermutu, yang bisa memberikan kepuasan kepada customers (pelanggan).

Secara sederhana pelanggan (customers) institusi pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu internal customer dan external customer. Internal customer adalah pengelola institusi pendidikan itu sendiri, yaitu kepala sekolah sebagai manager sekaligus leader, guru dan karyawan. Sedangkan external customer adalah masyarakat, pemerintah, orang tua dan dunia industri.

---

<sup>67</sup> Drs. Chaidir Nasution, M.H, *Hasil Wawancara Peneliti*

Suatu institusi pendidikan dikatakan bermutu, apabila kedua customer tersebut telah terjalin kepuasan atas jasa yang telah diberikan oleh institusi pendidikan terkait. Internal customer berposisi sebagai pihak yang memberi pelayanan dan merasa terpuaskan atas pelayanan yang diberikan. Sedangkan external customer adalah sebagai pihak yang terpuaskan mendapat pelayanan dari Internal customer.

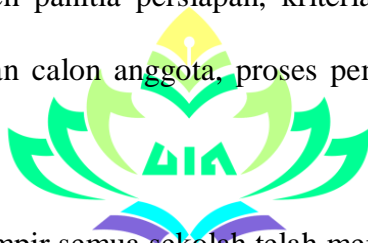
Maka institusi pendidikan membutuhkan suatu sistem (manajemen) pengelolaan yang mampu memberdayakan institusi pendidikan agar lebih bermutu dan mampu memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik Internal customer maupun external customer. Kelangsungan hidup suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat pelanggan (orang tua, siswa, dan stakeholder) terhadap lembaga pendidikan tersebut. Dukungan pelanggan tersebut juga tergantung apakah kebutuhan dan keinginannya dapat dipenuhi dan dipuaskan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Komite sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah.

Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan

suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Agar komite sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus memenuhi beberapa prinsip dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula. Komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan.



Secara formal hampir semua sekolah telah memiliki perangkat komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program pendidikan di sekolah. Kehadiran komite sekolah telah menunjukkan sahamnya sebagai mitra sekolah, terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, baik program pembangunan fisik, maupun non fisik. Adapun peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan diantaranya yaitu :

### **1. Sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*)**

Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan bagi sekolah memiliki arti bahwa komite sekolah dipandang sebagai mitra kerja kepada sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah melalui komite sekolah, orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan di tempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan,

program dan kegiatan sekolah. Selama ini keberadaan komite sekolah sangat berarti sekali bagi setiap satuan pendidikan karena komite sekolah itu merupakan pembantu utama satuan pendidikan dalam memakmurkan pendidikan sekolah (lembaga pendidikan) selain masyarakat internal sekolah.

Segala macam program yang akan dilaksanakan sekolah sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah. Sebab, segala macam kebijakan yang akan diterapkan ataupun yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat internal maupun eksternal sekolah. Hal ini sebagai mana yang diungkapkan oleh Bapak Tarmadi, M.Pd selaku kepala sekolah MTs N 2 Bandar Lampung sebagai berikut :

“Komite sekolah yang ada di MTs N 2 Bandar Lampung ini selalu memberikan pertimbangan dalam khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan, itu dilihat dari adanya musyawarah dan diskusi bersama dengan komite sekolah dan pihak sekolah apabila ada kebijakan atau keputusan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.”<sup>68</sup>

Dengan hal ini, hal serupa juga di ungkapakan oleh Bapak Drs. Chaidir Nasution selaku Ketua Komite MTsN 2 Bandar Lampung sebagai berikut:

“Komite sekolah selalu memberikan pertimbangan dan juga selalu ada pembicaraan yang baik atau musyawarah dengan kepala sekolah apabila ada kebijakan atau keputusan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.”<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Kepala MTs N 2 bandar Lampung

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Komite MTsN 2 Bandar Lampung

Hasil wawancara dengan salah satu wali siswa bahwa memang benar komite berperan dalam memberikan pertimbangan dalam peningkatan mutu pendidikan.<sup>70</sup>

Selain dari pada itu, posisi komite sekolah sebagai pemberi pertimbanganpun masih berlanjut pada pemberian masukan dan pertimbangan dalam hal rancangan anggaran dan pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Sebagaimana yang peneliti temukan di lapangan dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MTs N 2 yang menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidika di MTsN 2 bahwa keterlibatan komite sekolah bersifat menyeluruh, mulai dari pemberian masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS. Berikut hasil wawancaranya :

“Dalam perannya sebagai badan yang memberikan pertimbangan atau nasehat, komite sekolah di MTsN 2 dalam fungsi perencanaan pendidikan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS termasuk dalam penyelenggaraan rapat-rapat RAPBS.”<sup>71</sup>

## **2. Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*)**

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak.

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan salah satu wali siswa

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Kepala MTs N 2 bandar Lampung

Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidikan. Peran pendukung yang dipegang oleh komite sekolah tidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, namun lebih dari itu. Dengan berperan sebagai *supporting agency* ini, komite sekolah diharapkan dapat mendorong dan menyadarkan para orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.

Selain fungsinya mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam hal ini komite sekolah juga berperan dalam penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Tarmadi, M.Pd selaku kepala MTs N 2 Bandar Lampung sebagai berikut :

“Komite sekolah mempunyai peran yang sangat mendukung dan baik mulai dari sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua siswa. Misalnya dalam pengembangan fisik sekolah, komite sekolah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalan dana, pelaksanaan sampai pelaporan.”<sup>72</sup>

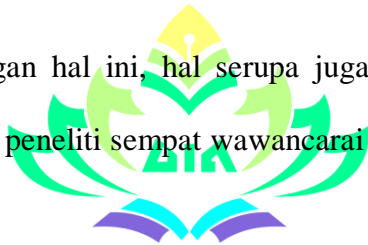
Komite sekolah juga ikut membantu dalam menunjang sarana dan prasarana sekolah terutama untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Drs. Chaidir selaku Ketua Komite MTs N 2 sebagai berikut :

---

<sup>72</sup> Ibid

“Komite sekolah peranannya sangat mendukung khususnya peningkatan mutu pendidikan di MTs N 2. Misalkan pada waktu rencana pengadaan ruang, disini komite sekolah berperan sebagai penggalang dana kepada orang tua siswa yang dikira-kira bisa membantu, tetapi dalam penggalangan dana ini komite sekolah dibagi menjadi tiga yaitu kelas unggulan, kelas khusus, dan kelas reguler dan jumlah dana yang dungut komite berbeda-beda, dan uang komite ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan siswa.”<sup>73</sup>

Sehubungan dengan hal ini, hal serupa juga di ungkapkan oleh salah satu orang tua siswa yang peneliti sempat wawancarai di pada waktu itu. Berikut hasil wawancaranya :



“Komite sekolah sangat mendukung dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, komite sekolah ini juga berfungsi sebagai penggalang dana dimana komite sekolah ini meminta dana sesuai dengan kelas dari siswa tersebut”<sup>74</sup>

### **3. Sebagai Pengontrol (*controlling agency*)**

Peran komite sekolah selanjutnya adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. Peran pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah meliputi kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah.

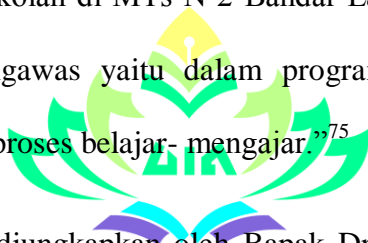
---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Komite MTsN 2 Bandar Lampung

<sup>74</sup> Wawancara dengan salah satu orang tua wali siswa

Komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu output pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggara pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Tarmadi, M.Pd selaku kepala MTs N 2 Bandar Lampung sebagai berikut :

“Peran komite sekolah di MTs N 2 Bandar Lampung yang bertindak sebagai pengontrol atau pengawas yaitu dalam program kerja sekolah, penambahan fasilitas sekolah dan proses belajar- mengajar.”<sup>75</sup>



Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Drs. Chaidir selaku ketua komite MTs N 2 Bandar Lampung sebagai berikut :

“kalau masalah kontrol, saya biasanya mengontrol atau melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepala sekolah dan program kerja sekolah, maupun dalam pengembangan dan penambahan fasilitas sekolah. Dan selain itu saya juga mengontrol proses belajar-mengajar peserta didik di MTs N 2 Bandar Lampung”.<sup>76</sup>

Peran *controlling* ini juga dimaksudkan agar komite sekolah sebagai partner sekolah dan kepala sekolah yang bisa memberikan pengawasan terhadap program kerja sekolah dan penambahan fasilitas sekolah serta mengawasi proses belajar mengajar yang terkhusus peningkatan mutu pendidikan di MTs N 2 Bandar Lampung.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Tarmadi, M.Pd selaku Kepala MTs N 2 Bandar Lampung

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Chaidir Selaku Ketua Komite



#### **4. Sebagai Mediator (*Executive*).**

Komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengedintifikasi kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua dan masyarakat.

Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat akuntabel (dipertanggung jawabkan) kepada masyarakat. Bagi komite sekolah peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Begitu juga halnya, dalam setiap menjalankan programnya sekolah. maupun komite sekolah senantiasa meminta bantuan kepada masyarakat, sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Drs. Chaidir selaku Ketua Komite MTs N 2 Bandar Lampung yang sementara dia menjelaskan terjadinya hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dengan masyarakat terutama dalam kaitanya dengan peningkatan mutu pendidikan. Berikut hasil wawancaranya :

“selain dalam pengembangan hal fisik, komite sekolah juga berperan sebagai penghubung antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Dimana, apabila ada peserta didik yang mendapat masalah di sekolah atau nakal-nakal di sekolah,

maka disini komite sekolah yang menyampaikan maksud sekolah terhadap siswa tersebut kepada orang tuanya dengan secara kekeluargaan.”<sup>77</sup>

Sehubungan dengan hal ini, hal serupa yang dinyatakan oleh Bapak Tarmadi, M.Pd selaku Kepala MTs N 2 Bandar Lampung sebagai berikut :

“komite sekolah disini sangat berperan sebagai mediator atau penghubung antara pemerintah sekolah, orang tua dan masyarakat.”<sup>78</sup>

Hal serupa juga dinyatakan oleh salah satu orang tua siswa. Berikut hasil wawancaranya :



“Komite sekolah sangat berperan sebagai penghubung antara sekolah dengan orang tua siswa, dalam hal menyampaikan maksud sekolah kepada siswa atau kepada orang tuanya itu disampaikan baik oleh komite sekolah dengan cara kekeluargaan.”<sup>79</sup>

Dalam hal ini kita bisa lihat bersama dari hasil peneliti yang temukan di lapangan bahwa komite di MTs N 2 Bandar Lampung ini sangat berperan sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*), Pendukung (*Supporting Agency*), Pengontrol (*Controlling Agency*), dan sebagai Mediator (*Executive*) dalam meningkatkan mutu pendidikan.

## **5. Faktor Pendorong Dan Penghambat Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan**

---

<sup>77</sup> Ibid

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Tarmadi, M.Pd selaku Kepala MTs N 2 Bandar Lampung

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan orang tua siswa

Faktor pendukung dan penghambat dalam suatu kegiatan pastilah ada. Begitu juga dengan kinerja Komite MTs N 2 Bandar Lampung dalam menjalankan peran dan fungsinya. Berikut ini peneliti paparkan hasil wawancara dengan responden.

a. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan peningkatan mutu, sekolah memiliki faktor yang dapat mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh sekolah dengan Komite Sekolah. Dengan faktor pendukung ini, sekolah lebih mudah untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu, karena selain mempermudah pelaksanaannya juga dapat dijadikan motivasi dalam proses berlangsungnya program tersebut.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala MTs N 2 Bandar Lampung sebagai berikut : “Faktor pendukung suksesnya Komite MTs N 2 Bandar Lampung dalam melaksanakan amanahnya, antara lain:

1. Ada kesamaan visi antara sekolah dan Komite Sekolah.
2. Komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis antara sekolah dengan Komite Sekolah yang sudah terjalin.
3. Adanya saling keterbukaan antara Komite Sekolah dengan sekolah, sehingga sekolah tidak merasa diawasi.”<sup>80</sup>

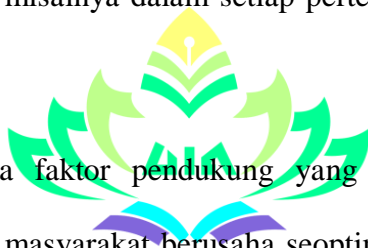
Sehubungan dengan hal ini, hal serupa juga dinyatakan oleh komite MTs N 2 Bandar Lampung sebagai berikut : “faktor pendukung peran komite sekolah diantara lain: Kerja sama yang baik yang telah terbina antara unsur-unsur di dalam

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Kepala MTs N 2 Bandar Lampung

sekolah dan unsur-unsur dalam masyarakat bersama anggota Komite Sekolah, Adanya keterbukaan dari pihak sekolah terhadap peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu atau kualitas pendidikan, Terwujudnya kekompakan wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan dalam mendukung program sekolah.”<sup>81</sup>

Hal serupa juga dinyatakan oleh salah seorang orang tua siswa bahwa :  
“Kalau saya lihat selama ini yang menjadi anggota Komite Sekolah sungguh-sungguh untuk aktif, misalnya dalam setiap pertemuan antara wali siswa dengan sekolah.”<sup>82</sup>



Dari beberapa faktor pendukung yang teridentifikasi di atas, antara sekolah, Komite dan masyarakat berusaha seoptimal mungkin untuk mendukung dan melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di MTs N 2 Bandar Lampung.

#### b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, peran komite sekolah juga memiliki faktor penghambat terhadap peningkatan mutu pendidikan di MTs N 2 Bandar Lampung. Sehubungan dengan hal ini berikut pernyataan Kepala MTs N 2 Bandar Lampung:

“Saya kira kendalanya berupa SDM, tersedianya waktu yang minim dari anggota Komite mengingat kegiatan di organisasi Komite Sekolah ini bukan pekerjaan pokok mereka sehingga diperlukan keikhlasan untuk menyisihkan waktu.”

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan komite MTs N 2 Bandar Lampung

<sup>82</sup> Wawancara dengan salah satu orang tua siswa

Hal serupa juga dinyatakan oleh ketua komite sekolah sebagai berikut:

“saya kira karena kurangnya koordinasi dan tidak ada waktu untuk aktif berorganisasi disebabkan karena latar belakang anggota komite sekolah mempunyai pekerjaan masing-masing, sehingga susahny koordinasi antar anggota komite sekolah.”

## **B. Pembahasan**

Pada pembahasan ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan dan menjawab apa yang sudah peneliti temukan dengan beberapa data yang sudah ditemukan, baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berangkat dari sini, peneliti mencoba mendeskripsikan data-data yang telah peneliti temukan berdasarkan dari logika dan diperkuat dengan teori-teori yang sudah ada yang kemudian di harapkan bisa didapatkan sesuatu yang baru.

### **1. Mutu Pendidikan**

Di negara Indonesia saat ini, masalah peningkatan mutu pendidikan selalu menjadi pembahasan yang menarik. Masalah yang ada yaitu pertama, pendidikan yang kuantitasnya begitu besar dan tersebar di seluruh penjuru negeri telah begitu kuat mengakar di dalam hati masyarakat Indonesia. Serta yang kedua, telah terjadi kemerosotan mutu pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tingkat pendidikan tinggi. Hal ini berlangsung akibat penyelenggaraan pendidikan yang lebih menitik beratkan pada aspek kuantitas dan kurang dibarengi dengan aspek kualitasnya.

Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, mutu mencakup input, proses dan output pendidikan.<sup>83</sup>

Input pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru-termasuk guru BP-, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan dan lain sebagainya).<sup>84</sup>

Dari segi input MTs N 2 Bandar Lampung dapat dikatakan cukup bermutu hal ini dilihat dari peserta didiknya yang mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya, di MTs N 2 juga memiliki pendidik atau guru-guru dan staf sekolah yang memadai, dan guru-guru tersebut telah menempuh jenjang pendidikan S1 dan S2 sebagian besar dari mereka berstatus PNS.

MTs N 2 Bandar Lampung juga di dukung oleh sarana dan prasarana sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti ada ruang sholat, mukenah, sarung, dan perlengkapan sholat lainnya, dan juga ada perpustakaan yang di dalamnya

---

<sup>83</sup> Rohiat, *Manajemen Sekolah; Teori Dasar dan Praktik*. 2008. Bandung: PT Refika Aditama, h. 51

<sup>84</sup> Ibid., h. 52

terdapat buku-buku pelajaran guna menambah wawasan pengetahuan peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Proses dikatakan bermutu apabila pengkordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb) dilakukan secara harmonis dan terpadu, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.<sup>85</sup>

## 2. Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa komite sekolah adalah partisipasi yang berlaku pada masyarakat selama ini belum diartikan secara universal. Makna partisipasi yang berlaku secara universal adalah kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan suatu program pembangunan.<sup>86</sup> Komite sekolah diatur dalam Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 044 / U / 2002 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis para *stakeholder* pendidikan sekolah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.<sup>87</sup>

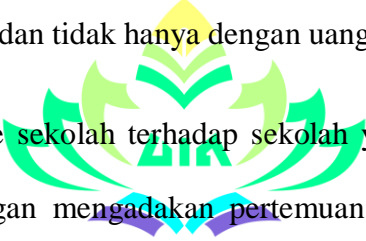
---

<sup>85</sup> Rohiat, *Manajemen Sekolah; Teori Dasar dan Praktik*. 2008. Bandung: PT Refika Aditama. h.53

<sup>86</sup> Depertamen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah*. 2003. hal. 9

<sup>87</sup> Ibid., h. 10

Komite sekolah itu tidak selalu berorientasi pada uang, tetapi juga pada hal-hal yang dapat diadakan bersama, seperti membentuk sistem belajar yang baik, turut serta memecahkan persoalan-persoalan yang ada dan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang dapat dikerjakan bersama tanpa harus mengeluarkan uang. Jadi komite sekolah itu tidak harus dibentuk untuk membiayai sekolah tersebut dan yang terpenting jika suatu daerah tergolong miskin bukan berarti tidak dapat terbentuk komite sekolah, sebab dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dengan berbagai cara dan tidak hanya dengan uang.



Kontribusi komite sekolah terhadap sekolah yang menyangkut kelembagaan dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi, serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah, memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan dan membahas laporan tahunan sekolah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan komite sekolah.

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Adapun pembentukan Komite Sekolah bertujuan sebagai berikut :

- a. Mewadahi dan menyalurkan inspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.



- b. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.<sup>88</sup>

Adapun peran yang dijalankan oleh Komite yang ada di MTs N 2 Bandar Lampung dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai berikut:

1. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*): Komite MTs N 2 Bandar Lampung sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah, selain itu juga komite sekolah memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS termasuk dalam penyelenggaraan rapat-rapat RAPBS.
2. Sebagai badan pendukung (*supporting agency*), peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi upaya peningkatan mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya, komite sekolah ikut membantu dan menunjang dalam masalah sarana dan prasarana sekolah, dan juga dalam pengembangan fisik sekolah komite sekolah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalan dana, pelaksanaan sampai pelaporan, dan juga dalam pengembangan fisik sekolah komite sekolah

---

<sup>88</sup> Depertamen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah*. 2003. hal. 13-14

memberikan dukungan seperti mengadakan penggalangan dana kepada orang tua siswa yang berlandaskan kepada kelas yang ditempati oleh siswa, ini dilakukan agar MTs N 2 Bandar Lampung bisa bersaing dengan sekolah lain karena meningkatnya sarana dan prasarana ataupun pengembangan fisik sekolah.

3. Sebagai badan pengontrol (*controlling agency*), komite sekolah di MTs N 2 Bandar Lampung melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah, dan juga mengawasi kualitas pendidikan di MTs N 2 Bandar Lampung dengan mengontrol proses belajar-mengajar, dan juga mengawasi atau mengontrol penambahan fasilitas sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggara pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.
4. Sebagai badan mediator (*Executive*), komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian sekolah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengedintifikasi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang tua dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Keberadaan MTs N 2 Bandar Lampung ini banyak memberi

manfaat, yang mana dengan adanya komite sekolah maka aspirasi orang tua bisa terwakilkan dan juga apabila ada penyampaian sekolah kepada orang tua itu disampaikan oleh komite sekolah secara kekeluargaan. Selain itu pihak sekolah juga selalu mendapat dukungan dari komite sekolah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan.

### **3. Faktor pendukung dan Penghambat Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Setiap lembaga suatu organisasi pasti memiliki faktor-faktor yang mendukung dan menghambat jalannya sebuah organisasi tersebut. Faktor pendukung dan penghambat dalam suatu kegiatan pastilah ada, begitu juga dengan organisasi komite sekolah yang ada di MTs N 2 Bandar Lampung dalam menjalankan fungsinya. Dalam pelaksanaan peningkatan mutu, sekolah memiliki faktor yang dapat mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh sekolah dengan Komite Sekolah.

Dengan adanya faktor pendukung ini kita bisa melihat bahwa adanya kesamaan antara visi sekolah dan komite sekolah, yang menjadikan kerjasama yang baik dan dorongan yang baik dimana terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis sehingga terjadi kekompakan dalam menjalankan sebuah program kerja yang membuat wali murid juga ikut sepakat dan mendukung program kerja sekolah.

Selain faktor pendukung, peran komite sekolah juga memiliki faktor penghambat terhadap peningkatan mutu pendidikan di MTs N 2 Bandar

Lampung. Lembaga komite sekolah telah ada dan dibentuk di setiap sekolah di Indonesia. Tetapi keberadaan komite sekolah masih banyak menghadapi beberapa hambatan. Penyebabnya antara lain: (1) karena pelaksanaan dan fungsi komite sekolah tidak selalu dapat memenuhi harapan tersebut, (2) pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah masih sangat variatif.<sup>89</sup>

Adapun yang menjadi faktor penghambat diantaranya :

- a. Masalah kurangnya SDM (sumber daya manusia).
- b. Kurangnya waktu yang tersisihkan untuk organisasi.
- c. Kurangnya koordinasi antara pengurus.

Dari masalah di atas bisa dilihat bahwa, adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat peran komite adanya masalah kurangnya SDM dan cuma komite sekolah yang aktif dalam kepengurusan ini. Selanjutnya, kurangnya waktu yang tersisihkan untuk organisasi, ini dikarenakan pengurus berlatar belakang yang berbeda dan menganggap bahwa organisasi komite sekolah bukan pekerjaan pokok mereka, sehingga harus ada keikhlasan menyisihkan waktu untuk organisasi ini. Selanjutnya, kurangnya koordinasi antara pengurus, ini diakibatkan kurangnya pertemuan antar pengurus karena pengurus mempunyai kesibukan masing-masing.

Beberapa faktor penghambat peran komite sekolah yang sudah dijelaskan diatas yang menyangkut anggota komite sekolah, ini merupakan tantangan tersendiri bagi komite, bagaimana kedepannya agar segala yang menjadi faktor

---

<sup>89</sup> Sri Renani Pantjastuti, *Komite Sekolah*. hal. 84

penghambat dapat diatasi agar komite sekolah lebih terorganisasi dengan baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di MTs N 2 Bandar Lampung.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

##### 1. Mutu Pendidikan

Mutu Pendidikan yang ada di MTs N 2 Bandar Lampung dapat dikatakan baik. Dari hasil obaservasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti

##### 2. Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung

- a. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*): Komite MTs N 2 sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbanagannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah, selain itu juga komite sekolah memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS termasuk dalam penyelenggaraan rapat-rapat RAPBS.
- b. Sebagai badan pendukung (*supporting agency*), peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi upaya peningkatan mutu pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya, komite sekolah ikut membantu dan menunjang dalam masalah sarana dan prasarana sekolah, dan juga

dalam pengembangan fisik sekolah komite sekolah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalan dana, pelaksanaan sampai pelaporan, dan juga dalam pengembangan fisik sekolah komite sekolah memberikan dukungan seperti mengadakan peggalangan dana kepada orang tua siswa.

- c. Sebagai badan pengontrol (*controlling agency*), komite sekolah di MTs N 2 Bandar Lampung melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah, dan juga mengawasi kualitas pendidikan.
- d. Sebagai badan mediator (*Executive*), komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian sekolah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah.

### 3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

- a. Faktor Pendukung
  - 1. Ada kesamaan visi antara sekolah dan Komite Sekolah.
  - 2. Komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis antara sekolah dengan Komite Sekolah yang sudah terjalin.

3. Adanya saling keterbukaan antara Komite Sekolah dengan sekolah, sehingga sekolah tidak merasa diawasi.
  4. Kerja sama yang baik yang telah terbina antara unsur-unsur di dalam sekolah dan unsur-unsur dalam masyarakat bersama anggota Komite Sekolah.
  5. Terwujudnya kekompakan wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan dalam mendukung program sekolah.
- b. Faktor Penghambat
1. Masalah kurangnya SDM (sumber daya manusia).
  2. Kurangnya waktu yang tersisihkan untuk organisasi.
  3. Kurangnya koordinasi antara pengurus

## **B. Saran**

1. Agar komite sekolah bisa lebih berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka hendaknya komite sekolah lebih meningkatkan hubungan kerja sama baik orang tua siswa, maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya, agar tercipta sikap toleransi dan saling mendukung dalam tujuan yang sama yaitu meningkatkan mutu pendidikan.
2. Peran komite dioptimalkan lagi, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan atau transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan agar lebih dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga peningkatan mutu pendidikan



semakin memungkinkan, disebabkan lahirnya ide-ide cemerlang dan kreatif semua pihak (*stakeholder*) pendidikan yang bersangkutan.

3. Komite sekolah dan pihak sekolah sendiri diharapkan dapat mencari terobosan baru yang dapat menggali dan menghasilkan dana untuk menunjang keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan.



## DAFTAR PUSTAKA

Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Tim Dosen  
2009. Manajemen Pendidikan Bandung: Alfabeta.

Annisah. 2007. “ *Peranan Komite Sekolah dalam Pengembangan Madrasah Tsanawiyah Negeri Jabung Talun Blitar*”. Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Malang.

Alcaro, Jerome S. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip dan Tata Langkah Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Danim, Sudarwan, 2006. *Visi Baru Manajemen sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hadi, Sutrisno, 1981. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, Jilid II.

Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan*: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Margono. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Moleong. Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Muhaimin. 2007. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mulyasa, E. 2006. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Rosda Karya. Cet. X.

Pantjastuti, Sri Renani, *Komite Sekolah*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008

Portanto, Pius A. Dan Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.

Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bandung*: Fokusmedia.

Rohiat, 2008. *Manajemen Sekolah; Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.

Roziqi, Abdul Rofiq, 2007. “*Strategi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan.*” Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan UIN Malang.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.

Sugiyono, 2012 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sukirno, 2006. *Pedoman Kerja Komite Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Widyamata.

Sukmadinata, Nana Syaodih, Dkk. 2006. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen*. Bandung: Refika Aditama.

Suryadi. Ace. 1992. *Indikator Mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia*. Jakarta: Balitbang Depdikbud.

Umeidi, 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

*Undang-Undang Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung Fokusmedia.

Uno, Hamzah B. 2007. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Chairul Anwar, 2014. *Hakikat Manusia Dalam Dunia Pendidikan, Sebuah Tinjauan Filosofi* . Yogyakarta: Suka – Press.

Chairul Anwar 2017, *Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta : IRCISOD.

Imam Gunawan 2017, *Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktek*, Bandung : Alfabeta Bandung.

Amirudin, 2015 Vol. 5 No. 1 ”*Reformulasi Manajemen Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pesantren Salaf di Kabupaten Pringsewu Lampung*” Jurnal Al-Idarah.

Muhammad Muhassin Vol.VII No. 2, 2017, *Kepemimpinan Visioner Kepala Madrasah dan Mutu Pendidikan di Madrasah*” jurnal AL-Adarah

Dra. Romlah, M.Pd. I, ”*MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM BUKU DARAS*” Jurnal UIN RADEN INTAN, 2016.